



Perumusan Kebijakan Pendidikan di Sekolah Dasar Unggulan

Formulation of Educational Policy in Leading Primary Schools

Dwi Ajeng Maulidya Makalao¹⁾*, Chaerly Mirochina²⁾, Pepen Supendi³⁾

1) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

2) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

3) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perumusan kebijakan pendidikan di Sekolah Dasar Unggulan Al-Izzah Bandung. Menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, bertujuan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah unggulan. Studi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui studi kasus. Penelitian dilakukan di SDU Al-Izzah Bandung, dengan menggunakan teknik pengumpulan seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen. Analisis Data dijelaskan secara naratif untuk memahami secara mendalam perumusan kebijakan pendidikan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDU Al-Izzah Bandung menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Keterlibatan pemangku kepentingan, pertimbangan terhadap konteks budaya, dan pemanfaatan media sosial menjadi strategi utama dalam memastikan kebijakan yang komprehensif dan responsif. Rekomendasi meliputi terus mengintegrasikan keterlibatan pemangku kepentingan, memperkuat pemahaman terhadap perubahan sosial, serta memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi.

Kata Kunci: Perumusan Kebijakan Pendidikan, Partisipatif, Media Sosial

Abstract

This research examines the formulation of educational policies at Al-Izzah Elementary School in Bandung. It highlights factors influencing policy implementation, aiming to provide recommendations for enhancing the quality of education at this prestigious school. Employing a qualitative approach with descriptive analysis through a case study, the study involves interviews, observations, and document analysis. Data are narratively described to deeply understand educational policy formulation at the school. Findings reveal the school utilizes both policy analysis and participatory approaches in policy formulation. Stakeholder involvement, cultural context considerations, and utilization of social media are primary strategies ensuring comprehensive and responsive policies. Recommendations include further integrating stakeholder involvement, strengthening understanding of social changes, and leveraging social media for transparency and communication.

Keywords: Formulation of Education Policies, Participatory, Social Media

Disumbit (02 Mei), Direview (25 Mei), Diterima (18 Juni)

How to Cite: Makalao, D.A.M., Mirochina, C. & Supendi, P. (2024). Perumusan Kebijakan Pendidikan Di Sekolah Dasar Unggulan. *JEER: Journal of Elementary Educational Research*. Vol 4 (1): 35-41.

*Corresponding author:

E-mail: ajengmakalao167@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa (Tilaar, 2004). Lingkungan pendidikan sekolah merupakan hal urgen bagi seseorang dalam kehidupan mereka karena hanya melalui pendidikanlah orang dapat menjadi lebih baik dan berkualitas (Ichsan, 2023). Di era globalisasi yang terus berkembang, tantangan dalam dunia pendidikan semakin kompleks. Sekolah-sekolah dituntut untuk memberikan pendidikan yang mampu mencetak generasi muda yang bukan hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan perkembangan zaman (Senge, 1994).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan membentuk sekolah-sekolah unggulan. Sekolah unggulan diharapkan mampu menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain dalam hal inovasi dan peningkatan mutu pendidikan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik sekolah unggulan (Nugroho, 2008).

Sekolah unggulan adalah sekolah yang memiliki kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti masukan siswa yang diseleksi secara ketat, fasilitas pembelajaran yang memadai, kurikulum yang memperkaya, sumber daya manusia yang berkualitas, serta lingkungan belajar yang kondusif. (Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, 2020).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji perumusan kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah unggulan. Studi yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2019) mengungkapkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sementara itu, penelitian (Ilyas, 2019) menekankan pentingnya kontekstualisasi kebijakan pendidikan dengan mempertimbangkan budaya lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Budiman, 2017) mengidentifikasi bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan.

Sekolah Dasar Unggulan Al-Izzah Bandung merupakan salah satu sekolah dasar unggulan di Kota Bandung yang telah menerapkan berbagai kebijakan pendidikan inovatif. Dalam hasil wawancara, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam proses perumusan kebijakan pendidikan di Sekolah Dasar Unggulan Al-Izzah Bandung. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak sekolah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah unggulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Pemilihan studi kasus dilakukan untuk memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap perumusan kebijakan pendidikan di SDU Al-Izzah Bandung. Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2003). Pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang khusus dan rinci terhadap fenomena perumusan kebijakan pendidikan di SDU Al-Izzah Bandung.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk mempelajari suatu kasus secara mendalam dan menyeluruh, dengan mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan kasus tersebut (Stake, 1995). Dalam penelitian ini, studi kasus dipilih untuk memahami secara komprehensif proses perumusan kebijakan pendidikan di SDU Al-Izzah Bandung, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi, aktor-aktor yang terlibat, serta dinamika yang terjadi dalam proses tersebut.

Populasi studi terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di sekolah tersebut, termasuk pengelola sekolah, dewan guru, orang tua siswa, komite sekolah, dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Dalam konteks studi kasus ini, semua individu atau kelompok yang relevan dengan proses tersebut akan menjadi subjek penelitian, sehingga tidak diperlukan pemilihan sampel.

Penelitian ini dilakukan di SDU Al-Izzah Bandung. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan para pihak terkait, observasi langsung di lingkungan sekolah, dan pengumpulan dokumen terkait perumusan kebijakan pendidikan, seperti keputusan rapat, kebijakan sekolah, dan catatan pertemuan komite sekolah.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen akan dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis akan digunakan untuk menjelaskan proses, pendekatan, dan peran aktor dalam agenda setting perumusan kebijakan pendidikan di SDU Al-Izzah Bandung secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa SDU Al-Izzah Bandung menggunakan kombinasi pendekatan analisis kebijakan dan pendekatan partisipatif dalam merumuskan kebijakan pendidikan mereka. Melalui pendekatan analisis kebijakan, sekolah melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks pendidikan. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi data dan bukti secara sistematis untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang perlu diatasi melalui kebijakan baru. sejalan dengan pentingnya menggunakan data dan bukti untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi kebijakan yang efektif. (Weimer & Vining, 2017)

Setelah melakukan analisis mendalam, SDU Al-Izzah Bandung juga menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, dewan guru dan staf, serta jajaran pengurus komite sekolah. Keterlibatan pemangku kepentingan ini memungkinkan adanya diskusi dan pertukaran pandangan yang kaya, serta memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mencerminkan perspektif dan kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Huisman, de Boer, & Bótas, 2020) yang menyoroti bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dapat meningkatkan relevansi, kepemilikan, dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, SDU Al-Izzah Bandung juga mempertimbangkan konteks budaya lokal dan kebutuhan masyarakat sekitar, seperti fokus pada nilai-nilai Islam dan pendidikan holistik. Hal ini sesuai dengan penelitian (Khalifa, Gooden, & Davis, 2016) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan

identitas budaya, norma, dan nilai-nilai masyarakat dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang responsif dan tepat sasaran.

Untuk membangun komunikasi dan keterbukaan dengan publik, SDU Al-Izzah Bandung memanfaatkan media massa dan media sosial sebagai saluran komunikasi terkait kebijakan pendidikan yang diambil. Penggunaan media sosial memungkinkan sekolah untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan baru, menerima masukan dari masyarakat, serta membangun dialog dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini didukung oleh studi (Kenchaiyah, 2020) yang menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi kebijakan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam diskusi kebijakan.

Dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di SDU Al-Izzah Bandung, terdapat beberapa aktor kunci yang berperan aktif, seperti kepala sekolah, dewan guru dan staf, serta pengurus komite sekolah. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini sejalan dengan penelitian (Easton, Monkman, & Miles, 2018) yang menyoroti pentingnya melibatkan perspektif yang beragam untuk memastikan kebijakan yang komprehensif dan mencerminkan kebutuhan berbagai pihak.

Dengan menggunakan kombinasi pendekatan analisis kebijakan dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mempertimbangkan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan media massa dan media sosial, SDU Al-Izzah Bandung berupaya untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan sekolah, didukung oleh penelitian-penelitian terkait yang relevan.

Sejalan dengan studi (Rahmawati, 2019), temuan penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pendidikan di SDU Al-Izzah Bandung. Sekolah menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan kepala sekolah, dewan guru dan staf, serta jajaran pengurus komite sekolah. Hal ini mendukung argumen bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam temuan, kontekstualisasi kebijakan pendidikan dengan mempertimbangkan budaya lokal dan kebutuhan masyarakat setempat, seperti yang ditekankan dalam penelitian (Ilyas, 2019), juga mungkin dilakukan di SDU Al-Izzah Bandung. Sekolah ini memiliki fokus pada nilai-nilai

Islam dan pendidikan holistik, yang dapat mencerminkan upaya untuk menyesuaikan kebijakan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Temuan penelitian ini tidak secara khusus menyoroti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan, seperti yang diidentifikasi dalam studi (Budiman, 2017). Namun, penggunaan media sosial oleh SDU Al-Izzah Bandung untuk berkomunikasi dengan publik terkait kebijakan yang diambil menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses ini, meskipun dalam lingkup yang lebih terbatas.

Dengan menggunakan kombinasi pendekatan analisis kebijakan dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mempertimbangkan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan media massa dan media sosial, SDU Al-Izzah Bandung berupaya untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan sekolah.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa dalam merumuskan kebijakan pendidikan, SDU Al-Izzah Bandung mengombinasikan pendekatan analisis kebijakan dan pendekatan partisipatif. Melalui analisis kebijakan, sekolah melakukan evaluasi sistematis terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sedangkan pendekatan partisipatif melibatkan kepala sekolah, dewan guru dan staf, serta jajaran pengurus komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah juga mempertimbangkan perubahan sosial di lingkungan sekitar dan tuntutan akuntabilitas, serta memanfaatkan media massa dan media sosial untuk berkomunikasi dengan publik terkait kebijakan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, H. (2017). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 31-43. <http://dx.doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2095>
- Easton, P., Monkman, K., & Miles, R. (2018). Public policy and education in multilingual societies. In A. F. Blackledge & A. Creese (Eds.) *The Routledge handbook of language and superdiversity*. Routledge.
- Huisman, J., de Boer, H., & Bótas, P. C. (2020). Stakeholder participation in higher education policy processes: Lessons from research. *Studies in Higher Education*, 45(11), 2363-2375.

- Ichsan, M. d. (2023). Pengembangan Kecerdasan Spiritual Siswa Perspektif Psikologi melalui Pembelajaran Fiqih. *Journal of Elementary Educational Research* Volume 3, No. 2, , 131-150. <https://doi.org/10.30984/jeer.v3i2.681>
- Ilyas, U. (2019). Kontekstualisasi Budaya dalam Sistem Pendidikan. *OJS IAIN Ternate*, 131-148. <http://dx.doi.org/10.46339/foramadiahi.v11i1.151>
- Kenchaiah, M. a. (2020). Social media in policy communication: The role of government agencies. *Public Relations Review*, 46(2).
- Khalifa, M. A., Gooden, M. A., & Davis, J. E. (2016). Culturally responsive school leadership: A synthesis of the literature. *Review of Educational Research*, 86(4), 1272-1311. <https://doi.org/10.3102/0034654316630383>
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmawati. (2019). *Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan di Sekolah Unggulan*.
- Senge, P. M. (1994). *The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization*. New York: Crown Currency; First American Edition First Printing.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE.
- Tilaar, H. (2004). *Manajemen pendidikan nasional : kajian pendidikan masa depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy analysis: Concepts and practice (6th ed.)*. Routledge.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods*. London: Sage.